

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan, peneliti sebelumnya mencari hasil penelitian terdahulu sebagai ukuran sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Binti Na'imatul Rochmawati. Penelitian ini berjudul Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat (studi sampel di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kediri) Malang 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan SMK Negeri 3 Kediri masih terkendala tentang kurangnya jam pelajaran pendidikan agama Islam yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan seperti Sholat Dhuha, Tadarrus dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya dipenuhi oleh pihak sekolah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Binti Na'imatul Rochmawati dengan penelitian kami adalah dari tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan kurikulum agama islam berbasis masyarakat. perbedaanya adalah penelitian Binti Na'imatul Rochmawati memfokuskan pada model pengembangan kurikulum agama islam yaitu

kurikulum subyek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum teknologi dan kurikulum rekonstruksi sosial. sedangkan penelitian kami memfokuskan pada pengembangan kurikulum yang lebih luas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Millatuddiana berjudul pengembangan kurikulum bahasa arab tahun 2010 dan implementasinya di diniyah takmilyah al munajah wonokromo bantul. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif, Jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pelaksanaan pengembangan kurikulum Bahasa Arab dan Implementasinya di Diniyah Takmilyah Al Munajah Wonokromo Bantul masih terkendala pada :

- a. Pemahaman guru terhadap kurikulum bahasa Arab Diniyah Takmilyah masih minim bahkan ada yang tidak tahu.
- b. Belum ada buku pelajaran baru yang menggunakan kurikulum 2010.
- c. Partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan Diniyah Takmilyah yang masih minim.
- d. Tingkat kehadiran siswa yang rendah.
- e. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar Bahasa Arab.
- f. Keterbatasan waktu.

Persamaan penelitian yang dilakukan Millatuddiana dengan penelitian kami adalah dari tujuannya yaitu pengembangan kurikulum pendidikan. sama-sama membahas tentang pengembangan kurikulum dan menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode library research akan tetapi perbedaan dalam penelitian tersebut implementasinya berbeda kalau

penelitian yang dilakukan oleh Millatuddiana menitik beratkan pada pengembangan kurikulum dan penerapannya lebih ditekankan pada pelaksanaan pengembangan kurikulum bahasa arab. Adapun penelitian yang difokuskan saat ini adalah pengembangan kurikulum berbasis masyarakat di lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah Nahdlatul Arifin Sumberejo Ambulu Jember tahun pelajaran 2014/2015.

B. Kajian Teori

1. Konsep Pengembangan Kurikulum

a. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan belajar adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan, peralatan, dan lingkungan tempat siswa belajar yang diinginkan diharapkan terjadi.¹²

Dalam pengertian di atas, sesungguhnya pengembangan kurikulum adalah proses siklus, yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut terdiri dari empat unsur yakni :

1. Tujuan : mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran,

¹² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 96.

baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh.

2. Metode dan material : mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang serasi menurut pertimbangan guru.
3. Penilaian (*assesment*): menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan itu dalam hubungannya dengan tujuan, dan bila mengembangkan tujuan-tujuan baru. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.¹³
4. Balikan (*feedback*): umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya.¹⁴ Untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik diperlukan beberapa teknik yang sesuai dan tepat dengan diri setiap anak didik sebagai makhluk individual.¹⁵

b. Prinsip-prinsip Pengembangan kurikulum

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, merupakan

¹³ Abd. Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Galang Press, 2009), 145.

¹⁴ *Ibid*, 96-97.

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah & Zain Aswan, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 161.

prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya.¹⁶

Ada lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Prinsip relevansi: secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis). Implikasinya adalah mengusulkan agar kurikulum yang ditetapkan harus dibentuk sedemikian rupa, sehingga tuntutan pendidikan dengan kurikulum tersebut dapat memenuhi jenis dan mutu yang dibutuhkan masyarakat, serta tuntutan vertikal dalam mengemban nilai-nilai ilahi sebagai *rahmatan li al-'alamin*.¹⁷
2. Prinsip berorientasi pada tujuan: yakni kurikulum sebagai suatu system, memiliki tujuan, materi, metode, strategi, organisasi, dan evaluasi. Komponen tujuan atau kompetensi merupakan titik tolak dan focus bagi komponen-komponen lainnya dalam pengembangan system tersebut.
3. Prinsip fleksibilitas dan kontinuitas
 Prinsip fleksibilitas : dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.
 Prinsip kontinuitas : yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.

¹⁶ Sholeh hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 73-78.

¹⁷ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 168.

4. Prinsip efisiensi dan efektivitas : yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Dan prinsip efektivitas yang mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Prinsip integritas : yakni pengembangan yang menunjukkan adanya hubungan horizontal pengalaman belajar, sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman itu dalam suatu kesatuan. Artinya, pengalaman belajar itu tidak berdiri sendiri, melainkan dapat diterapkan dalam bidang lainnya.

2. Konsep Kurikulum Berbasis Masyarakat

a. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat

Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat dan berusaha mencintai lingkungan hidup, sehingga sebuta kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah.

Berdasarkan teori berbasis masyarakat beberapa teori kurikulum ini setuju bahwa tingkat sosial harus menjadi titik awal dan penentu utama kurikulum. Para ahlinya berbeda pendapat diantara mereka sendiri mengenai sekolah harus mendasarkan diri pada level sosial yang

ada.selanjutnya mereka bisa dikategorikan berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Konformis

Percaya bahwa pelevelan masyarakat yang ada sekarang ini merupakan yang terbaik.

2. Reformis

Menganggap masyarakat sebagai pemilik suara yang utama dalam struktur demokratis mereka. Tetapi menginginkan suatu reformasi utama di tingkat sosial. Dan alat utamanya adalah kurikulum.

3. Futuris

Melihat tahun-tahun mendatang daripada terpaku pada masalah-masalah. Mereka menganalisa perkembangan saat ini membuat prediksi dari data yang ada dan memberikan skenario alternatif mereka menggaris bawahi pilihan yang dimiliki orang-orang dalam membentuk tahun-tahun ke depan serta menguatkan atau mendorong sekolah-sekolah untuk memberi murid mereka alat untuk membentuk masa depan yang lebih baik untuk mereka.

4. Radikalis

Mereka yang menganggap bahwa masyarakat sebagai pendukung kurikulum yang cacat dimana mereka akan menunjukkan kekurangan-kekurangan tersebut dan memperkuat anak-anak muda untuk mempengaruhi perubahan radikal. Biasanya efek dari pandangan neo marxis, mereka percaya bahwa masalah-masalah

pada saat ini hanyalah gejala. Ketidakadilan sosial yang merasuk dalam kapitalis teknologi.¹⁸

b. Tujuan Kurikulum Berbasis Masyarakat

Tujuan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang hendak dicapai. Beberapa terminologi yang berhubungan dengan tujuan adalah aim, objective, goal, dan target.¹⁹

Keempat hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Aim

Aim adalah suatu tujuan umum yang akan dicapai dengan relatif makan waktu yang cukup lama. Misalnya, tujuan pendidikan nasional.

2. Objective

Objective adalah tujuan yang berupa bagian dari aim yang diprogramkan secara bulat. Misalnya, tujuan institusional.

3. Goal

Goal adalah bagian tujuan dari objective yang berupa bagian-bagian yang diprogramkan secara utuh. Misalnya, tujuan instruksional umum atau tujuan mata pelajaran.

4. Target

Target adalah sasaran tujuan pendidikan yang berupa berbagai pokok permasalahan. Misalnya, tujuan instruksional

¹⁸ Selengkapnya dalam dibaca dalam artikel di web: <http://dheo-education.blogspot.com/kurikulum-berbasis-masyarakat.html>2008/05/

¹⁹ Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 22.

khusus, sasarannya adalah tujuan pokok bahasan atau tujuan sub pokok bahasan.

Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁰

Dengan melihat beberapa uraian tentang tujuan kurikulum tersebut, maka dapat diambil pengertian dari tujuan kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat bertujuan untuk menghasilkan out put yang dapat diterima sebagai anggota masyarakat sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi.

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

a. Konsep Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya tidak jauh beda dari kondisi pendidikan nasional secara umum. Pendidikan Islam juga mengalami berbagai masalah, diantaranya adalah persoalan

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia No, 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya (Surabaya: Media Centre, 2005), 8.

dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya serta manajemennya. Masalah-masalah tersebut muncul seiring dengan kondisi masyarakat yang semakin maju, termasuk juga kemajuan yang dialami oleh masyarakat muslim.

Menurut Hujair untuk membangun masyarakat madani di Indonesia diperlukan usaha pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar. Dalam bukunya *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia* disebutkan bahwa usaha pembaharuan itu meliputi:

(1) Perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada fitrah atau potensi, (2) Pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena dalam pandangan Islam bahwa ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT, (3) Pendidikan di desain menuju tercapainya sikap dan perilaku “toleransi”, lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (4) Pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (5) Pendidikan yang menumbuhkan etos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, dan (6) Pendidikan Islam perlu didesain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat untuk menuju masyarakat madani serta lentur terhadap perubahan zaman dan masyarakat.²¹

Sebelum lebih jauh membahas tentang persoalan-persoalan pendidikan Islam di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam.

21 Hujair AH, Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islammembangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 10.

Karena ketika kita membahas hal ini sering terjadi kerancuan di dalamnya, padahal sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar pada pengertian keduanya.

Muhaimin membedakan antara pengertian Pendidikan Islam dengan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

Pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami, yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang diidealkan. Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam dibakukkan sebagai nama kegiatan mendidihkan agama Islam.²²

Pendapat lain menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*).²³

Selain itu Pendidikan Agama Islam juga dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam, disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.²⁴

²² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

²⁴ Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Rosda, 2004), 130

Setelah mengetahui perbedaan dari kedua istilah di atas, selanjutnya adalah pembahasan yang terfokus pada Pendidika Agama Islam khususnya masalah kurikulum yang dilaksanakan.

Bukan hanya kurikulum pendidikan secara umum yang dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang selalu dinamis, namun kurikulum Pendidikan Agama Islam juga tidak lepas dari tuntutan tersebut. Karena pada kenyataannya banyak siswa yang telah mendapatkan bekal nilai-nilai agama di sekolah, tetapi ketika mereka hidup di masyarakat masih tetap melakukan banyak pelanggaran tas nilai-nilai tersebut. Hal ini akan mengundang kekecewaan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna produk pendidikan. Meskipun sebenarnya masalah tersebut tidak selayaknya hanya dibebankan pada pendidikan agama saja karena mata pelajaran lain juga mengemban beban yang sama dalam hal penanaman moral. Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.²⁵

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Republik Indonesia No, 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS* (Bandung: Citra Umbara, 2006), 173

Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu usaha perbaikan Pendidikan Agama Islam adalah melalui kurikulumnya. Kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dirancang dengan acuan dan landasan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budaya yang dimilikinya.

b. Fungsi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

Secara umum fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat dibedakan ke dalam tiga segi, yaitu:

- 1) Bagi sekolah/ madrasah yang bersangkutan
 - a. Sebagai alat untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam yang diinginkan atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi PAI.
 - b. Pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan Pendidikan Agama Islam di sekolah/ madrasah
- 2) Bagi sekolah/ madrasah di atasnya
 - a. Melakukan penyesuaian
 - b. Menghindari keterulangan sehingga boros waktu
 - c. Menjaga kesinambungan

3) Bagi masyarakat

- a. Masyarakat sebagai pengguna lulusan (*user*), sehingga seolah/madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI
- b. Adanya kerja sama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI.²⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dirancang dengan acuan dan landasan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budaya yang dimilikinya, oleh karena itu kurikulum ini memiliki fungsi menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam sehingga mereka dapat terjun ke masyarakat dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Melalui UU No. 2 Tahun 1999 kepengurusan pendidikan dan kebudayaan diserahkan kepada daerah bahkan kepada kabupaten. Hal ini mempunyai implikasi yang sangat jauh di dalam pengelolaan pendidikan yang lebih dekat kepada kebutuhan masyarakat.²⁷ Dengan wewenang ini pemerintah daerah dapat mengidentifikasi segala potensi yang dimiliki daerahnya, serta kebutuhan dan budaya masyarakatnya. Dengan demikian kurikulum berbasis masyarakat,

²⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 11

²⁷ A, R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 157

termasuk kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, dapat dilaksanakan dengan baik karena kurikulum yang dikembangkan lebih terarah.

c. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

Karakteristik merupakan suatu ciri khas yang membedakan antara bentuk kurikulum yang satu dengan bentuk kurikulum yang lain. Dalam kamus induk istilah ilmiah disebutkan pengertian dari karakteristik, yaitu: “memiliki sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu; ciri-ciri khusus; ciri khas; kekhususan; kekhasan”²⁸

Karakteristik dari kurikulum Pendidikan Agama Islam tahun 1994 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Karakteristik kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum tahun 1994 dapat dipahami dari segi bentuk, isi dan struktur serta pengorganisasiannya. *Pertama*, dari segi bentuk, karakteristik kurikulum PAI 1994 berbentuk uraian ke bawah dan lebih sederhana dibanding kurikulum 1984 yang berbentuk kolom-kolom ke samping dengan kolom yang banyak sehingga sulit memahaminya. *Kedua*, dari segi isi, kurikulum 1994 lebih menekankan beberapa unsur pokok pada masing-masing jenjang, penekanan utama adalah materi yang diberikan selalu mengacu kepada pengamalan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kurikulum 1994 disempurnakan menjadi kurikulum 1999 yang kemudian dijadikan suplemen kurikulum 1994, salah satu karakteristiknya adalah adanya perincian tentang kemampuan dasar lulusannya dan indikator keberhasilan, serta penyederhanaan tema dari tujuh tema menjadi lima tema pokok. *Ketiga*, dari segi struktur dan

²⁸ M, Y, Al-Barry, dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya, Target Press, 2003), 359

pengorganisasiannya kurikulum 1994 adalah menggunakan pendekatan kurikulum berbasis materi atau mata pelajaran.²⁹

Melihat dari karakteristik kurikulum Pendidikan Agama Islam di atas, maka dapat pula diketahui karakteristik kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, antara lain adalah sifat pengembangannya yang didasarkan pada kondisi masyarakat serta mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan inti dari pengembangan kurikulum ini adalah untuk menyiapkan anak didik yang dapat menyelesaikan berbagai problema sosial yang dihadapi di masyarakat.

d. Landasan-landasan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

Landasan dalam mengembangkan kurikulum adalah suatu pedoman yang dijadikan dasar dalam operasional pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat ada beberapa hal yang dijadikan landasan dalam proses operasionalnya. Landasan-landasan tersebut antara lain:

1) Agama

Kurikulum Pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam. Mengutip pendapat Arifin dalam buku *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* karya dari Dr. Abdullah Idi, M.Ed, disebutkan bahwa:

²⁹Supriyadi, *Studi Tentang Karakteristik Kurikulum Pendidikan Agama Islam Seklah Menengah Umum Tahun 1994* (<http://digilib.itb.ac.id>, di akses 6 Juni 2003)

Tujuan Pendidikan Islam ialah merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhoan-Nya.³⁰

Tujuan pendidikan di atas dinilai relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang juga mengandung maksud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(a). Al-Qur'an

Islam sebagai agama wahyu yang sangat mementingkan hidup masa depan yang berorientasi duniawi-ukhrawi telah menempatkan dasar teoris dalam ayat-ayat Al Qur'an, antara lain tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظروا نفس ما قد مت لغد واتق الله ان
الله خبير بما تعملون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³¹

Pola kehidupan manusia yang selalu dinamis menuntut perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Sejalan dengan perubahan zaman, umat muslim juga mengalami perubahan. Berbagai perubahan

³⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 59.

³¹ *Al Qur'an Al Karim dan Terjemanya* (Semarang, Karya Toha Putra, tt), 437.

yang terjadi ini merupakan hasil dari karya manusia. Dengan demikian, baik dan buruknya keadaan suatu masyarakat juga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau mengubah keadaannya sendiri.

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS. Ar-Ra'du ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”³²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT akan mengubah keadaan masyarakat jika mereka mengadakan perubahan pada diri mereka.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, ayat tersebut memberi pengertian bahwa diperlukan adanya suatu perubahan untuk mengiringi perubahan zaman, dan perubahan itu dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri.

(b) Hadist

Dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam proses perubahannya. Hal ini karena masyarakat yang mengalami

³² Ibid, 199.

perubahan, sehingga mereka yang memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Tanggung jawab atas keadaan masyarakat ini telah dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ash Shidiq sebagai berikut:

ان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب

Artinya: “Sesungguhnya jika manusia melihat orang yang melakukan kedzaliman, kemudian mereka tidak menindaknya, maka hampir Allah Ta'ala meluaskan siksaan kepada mereka semua.”³³

(c) Ijtihad

Selain ayat Al Qur'an dan Hadist yang telah disebutkan di atas, juga terdapat nasehat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Ali bin Abi Thalib, “Didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididikkan kepada kalian sendiri, oleh karena ia diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian”.³⁴

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kondisi antara satu generasi dengan generasi selanjutnya telah disadari sejak dulu. Dan harapan ahabat Nabi itu menunjukkan bahwa konsep kurikulum pendidikan agama Islam memiliki jangkauan yang panjang untuk masa depan siswa.

³³ Ahmad Mustafa Al Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Toha Putra, 1994), 143

³⁴ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 61

2) Yuridis

Pada dasarnya pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia tidaklah terlepas dari landasan yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat. Landasan yang dijadikan acuan antara lain adalah:

a) Pancasila

Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia dan sebagai landasan ideal pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan asas-asas pengembangan kurikulum, yaitu asas filosofis, bahwa falsafah bangsa sangat menentukan proses pengembangan kurikulum pendidikannya. Dalam sila kesatu dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pendidikannya juga di arahkan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada diri siswa.

b) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan landasan struktural/konstitusional dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat. Disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:”1) negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”³⁵

c) Peraturan perundang-undangan lain

Sebelum disebutkan landasan operasional pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, terlebih dahulu perlu diketahui landasan dilaksanakannya Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah. Abdul Majid menyebutkan bahwa:

Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 jo Tap MPR No. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap MPR No.II/MPR/1988 dan Tap MPR No.II/MPR 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.³⁶

Selanjutnya, lebih khusus tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai

³⁵ Abdul Majid dkk, E, Mulyasa ed, , *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Rosda, 2004), 132.

³⁶ Ibid, 132-133.

dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.³⁷

Dan masih pada pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa: “Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.”³⁸

Merujuk dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah di masa yang akan datang sejalan dengan kondisi yang selalu dinamis. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka diperlukan suatu kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dengan adanya kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, diharapkan pendidikan akan mampu menjawab segala problematika sosial yang terjadi.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum, baik itu sebagai penghambat maupun

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Republik Indonesia No, 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra Umbara, 2006), 105.

³⁸ Ibid.

yang menjadi penguat pengembangan kurikulum. Adapun faktor pendukungnya antara lain: perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai.³⁹

Penjelasan dari faktor pendukung tersebut adalah:

a) Perguruan Tinggi

Kurikulum di sekolah-sekolah minimal mendapatkan dua pengaruh mendasar dari keberadaan perguruan tinggi.

Pertama, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi kurikulum di sekolah. Pengaruh ini dapat berupa alat bantu pelajaran dan media pendidikan.

Kedua, perguruan tinggi yang menyiapkan tenaga kependidikan juga memberikan pengaruh yang besar pada kurikulum di sekolah. Dengan adanya lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kependidikan tersebut dapat diperkirakan tenaga pendidik yang akan dihasilkan. Jika perguruan tinggi tersebut dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas naik maka pendidikan di sekolah juga akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan.

Apapun kurikulum yang dikembangkan, jika tenaga pendidik dapat menguasai materi dan lapangan dengan baik maka kurikulum juga akan berhasil dengan baik.

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 158.

Sebagaimana dikatakan Wina Sanjaya, bagaimanapun peran guru tetap diperlukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak berarti menyurutkan peranan guru, justru tanggung jawab dan peran guru akan semakin besar.⁴⁰

b) Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Jadi, kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Kurikulum seharusnya relevan, dalam artian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat, apakah masyarakat homogen, heterogen, agraris, industri, atau yang lainnya.

Hasbullah berpendapat penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun swasta harus berani mengambil sikap dan wawasan bahwa mau tidak mau setiap sekolah harus melibatkan masyarakat setempat, terutama orang tua peserta didik, dalam pengembangan pendidikannya.⁴¹

c) Sistem nilai

Di dalam masyarakat terdapat sistem nilai yang terdiri atas nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa sebagai anggota masyarakat. Menurut

⁴⁰ Wina Sanjaya, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

⁴¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 57.

Nana Syaodih, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai tersebut pada siswa, antara lain:

(1) guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, (2) guru hendaknya berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, (3) guru berusaha menjadikan diri sebagai teladan, (4) guru menghargai nilai-nilai kelompok lain, dan (5) memahami dan menerima keragaman kebudayaan sendiri.⁴²

Di samping beberapa faktor di atas, ada satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu pengembangan kurikulum, yaitu keadaan siswa. Siswa merupakan suatu komponen *input* dalam proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan ditentukan oleh keadaan, kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri.⁴³

Siswa sebagai anggota masyarakat dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sudah tentu masyarakat berpengaruh besar terhadap perkembangan mereka. Sebaliknya, karena sebagai individu siswa juga merupakan anggota masyarakat, maka perkembangan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi mereka juga akan memberikan timbal balik terhadap masyarakat. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa karena masyarakat merupakan salah satu dasar dalam penyusunan kurikulum, maka siswa pun selaku komponen masyarakat harus dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum.

⁴² Ibid, 160.

⁴³ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 116.

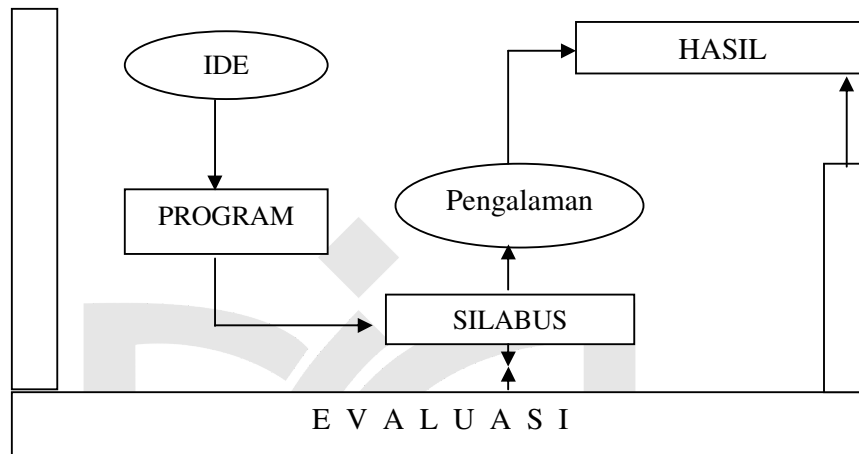
Dengan memperhatikan faktor siswa ini maka pengembangan kurikulum akan lebih efektif. Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan siswa akan mudah diterima oleh mereka sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar yang pada akhirnya tujuan kurikulum juga akan tercapai. Hal ini juga berlaku untuk pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat. Dengan memperhatikan bahwa siswa adalah anggota masyarakat dan terdapat hubungan timbal balik antara keduanya, maka pengembangan kurikulum dapat lebih terarah. Selanjutnya siswa dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Dengan demikian berarti upaya untuk menyiapkan siswa agar siap terjun ke lingkungannya sebagai anggota masyarakat yang dapat bersosialisasi dengan dasar-dasar agama, dapat terpenuhi.

f. Proses Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat

Secara garis besar proses pengembangan kurikulum terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Untuk memahami masalah ini dengan lebih jelas, Hasan menggambarkan *chart* sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

Pengembangan Kurikulum PAI



PERENCANAAN IMPLEMENTASI EVALUASI

Chart tersebut menggambarkan bahwa seseorang dalam mengembangkan kurikulum PAI dimulai dari kegiatan perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan itu dimulai dari ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam suatu program. Ide-ide tersebut diolah sedemikian rupa hingga dikembangkan sebagai dokumen. Dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses pelaksanaannya, yang dapat berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk satuan acara pembelajaran atau SAP, proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas, serta evaluasi pembelajaran, sehingga diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Dari evaluasi ini akan diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk penyempurnaan selanjutnya. Dengan demikian, proses pengembangan kurikulum menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasinya itu sendiri.

Berbagai cara untuk melakukan evaluasi kurikulum, terutama yang berkaitan dengan aspek yang dievaluasi, alat pengumpul data dan prosedur yang digunakan. Kriteria yang dipertimbangkan, serta penggunaan pemahaman untuk mengambil keputusan.⁴⁵



⁴⁵ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004: Panduan Pembelajaran KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 163.